

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Kemiskinan

A. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang, yang tidak mampu menyelenggarakan sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Masalah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, diantaranya tingkat pendapatan masyarakat, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lingkungan, lokasi, geografis, pendidikan dan pengangguran. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan makanan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menyingkahi hasil-hasil pembangunan (Todaro, 2004).

Kemiskinan sering dipahami dengan gejala rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat semata, padahal kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multi dimensi. Kemiskinan dapat pula dipandang sebagai suatu hal yang absolute dan relatif. Tingkat kehidupan yang rendah seringkali menjadi tolak ukur kemiskinan, padahal tingkat kehidupan yang rendah merupakan salah satu mata rantai dari

munculnya lingkaran kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar standar atas aspek kehidupan (Ismuningsih, 2010).

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi kemiskinan termanifestasikan dalam bentuk kekurangan air, perumahan sehat, gizi, tingkat pendidikan yang rendah dan perawatan kesehatan yang kurang baik.

Kemiskinan secara sosial apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain sandang, pangan, kesehatan, pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja, dan perumahan. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal modal atau miskin karena sebab alami. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiki terhadap pakaian, makanan, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1987).

Kemiskinan menurut salim (1980) juga dapat diartikan lebih spesifik yaitu memandang kemiskinan yang digambarkan sebagai rendahnya tingkat pendapatan yang digunakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari disini termasuk kebutuhan pokok yang mendasar, seperti kebutuhan dalam hal kehidupan yang layak, sifat menghargai satu sama lain, kesehatan, dan kehormatan yang diperoleh layaknya orang lain serta kebebasan dalam lingkungan bermasyarakat. Kebutuhan manusia sangat bermacam-macam, yang bersifat multi-dimensional, aspek kemiskinan apabila dilihat melalui segi publik *policy* terdapat 2 aspek antara lain adalah:

1. Aspek kemiskinan sekunder, seperti miskin jejaring sosial, informasi, dan keuangan.
2. Aspek kemiskinan primer, seperti miskinnya wawasan, keterampilan, asset, serta keorganisasian dalam bidang sosial maupun politik.

Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan banyaknya jumlah pengangguran dimana selanjutnya hal itu menyebabkan ketimpangan pendapatan serta kesenjangan antar golongan penduduk. Kemiskinan dapat didefinisikan dimana kondisi kehidupan seseorang dalam standar yang rendah, beberapa konsep kemiskinan yang dikenal yaitu (Sarnggih, 2014:22) :

1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ini tidak memiliki batas kemiskinan yang jelas sebagai analogi pendapatan diperoleh seseorang yang tinggal dikawasan elit, walaupun orang tersebut telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dimana sebenarnya memiliki pendapatan yang cukup, akan tetapi jika di nilai dalam lingkungan masyarakat pendapatan yang diperoleh seseorang tersebut masih rendah sidabah rata-rata, dan mereka masih merasa berada dalam tingkat kemiskinan. Apabila seseorang mengalami perubahan taraf hidup maka hal tersebut akan berdampak pada berubahnya garis kemiskinan, kemiskinan memiliki sifat dinamis atau selalu terjadi dalam lingkungan masyarakat.

2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut ini dapat digolongkan kedalam 2 bagian yaitu:

- A. Kemiskinan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
- B. Kemiskian yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kemiskinan relatif dan absolut adalah suatu konsep kemiskinan yang mengacu pada seberapa besar kepemilikan seseorang atau sebuah keluarha yang dikaitkan dengan standar kelayakan hidup, istilah keduanya itu menunjukkan pada perbedaan social yang ada dalam masyarakat dilihat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya telah ditentukan terlebih dahulu yang menggunakan angka-angka nyata (garis kemiskinan) serta indikator

kemiskinan atau kriteria yang telah digunakan, sedangkan pada kemiskinan relative ditentukan dari perbandingan relatif dari tingkat kesejahteraan antar masyarakat (Saranggih, 2015).

B. Ukuran Kemiskinan

untuk menghitung garis kemiskinan internasional, Bank Dunia mengkonvensi garis kemiskinan 75 negara tersebut yang dinyatakan dalam mata uang masing-masing Negara ke dollar AS. Kemudian, dengan menggunakan teknik statistik tertentu atau analisa regresi, para peneliti Bank Dunia mendapatkan bahwa rata-rata garis kemiskinan untuk 15 negara termiskin ialah sebesar 38 dollar AS per kapita per bulan atau sekitar 1,25 dollar AS perkapita per hari. Berdasarkan temuan ini, Bank Dunia menetapkan bahwa garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari.

Penerapan perhitungan kemiskinan dalam masyarakat adalah dimana masyarakat tersebut memiliki penghasilan dibawah Rp. 7.057 per orang per hari. Penetapan jumlahnya berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makan dan non makan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per capital per hari. Sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk pendidikan, perumahan, dan kesehatan (Saragih, 2014).

Untuk mengukur garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan bukan makan yang di ukur dari sisi pengeluaran. Jadi yang dimaksud penduduk miskin itu ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dan perhitungannya dilakukan pada daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

C. Penyebab Kemiskinan

Jalanan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbebas kebebasan ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita, dan tingginya pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat pendapatan

berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita (Todaro, 2006).

2. Korupsi

A. Pengertian Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Dengan kata lain, korupsi merupakan benalu social dan masalah besar yang sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi Kuno.

Menurut Alatas (1987) menandakan esensi korupsi sebagai pencurian yang melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode penipuan dan pencurian. Kemudian menurut Bank Dunia pengertian korupsi hanya pada “pemanfaatan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi”.

Dalam pandangan hukum disebutkan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana,

memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi, dan unsur terakhir ialah merugikan suatu Negara atau perekonomian Negara tersebut.

Menurut Huntington (1968) mendefinisikan korupsi sebagai. *“behavior of public officials which deviates from accepted norms in order to server private ends”*. Korupsi merupakan perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan oleh para pegawai public. Korupsi juga dapat diibaratkan bayangan yang akan selalu mengikuti kemanapun subjek kekuasaan berada, dimana ada kekuasaan dan wewenang, maka korupsi akan berada tidak jauh dari situ.

Pada umumnya masyarakat menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan malawan hukum atau terlarang dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling identik perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Menurut *Asian Development Bank* (ADB) defenisi korupsi adalah “korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, yang mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka bekerja atau ditempatkan”.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan banyak pertimbangan oleh mereka yang justru merasa orang yang terpelajar dan terdidik. Korupsi juga bisa terjadi ketika seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan mempunyai kesempatan untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Nye mendefinisikan tentang korupsi sebagai perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai public untuk meningkatkan status atau untuk mendapatkan keuntungan finansial. Selain itu bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, ataupun simbol.

Selanjutnya jika berpijak pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasikan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas yaitu:

1. Penyuapan pejabat publik nasional;
2. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik;
3. Penggelapan penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh pihak pejabat publik;
4. Memperdagangkan pengaruh;
5. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
6. Memperkaya diri sendiri secara tidak sah;

7. Penyuapan pada sektor privat;
8. Penggelapan kekayaan pada sektor privat.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan menyembunyikan, tindakan mengambil menggelapkan harta Negara atau masyarakat. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Ketiga melawan norma-norma yang berlaku dan sah. Keempat, demi kepentingan pribadi, keluarga, atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun Negara.

B. Penyebab korupsi

Faktor-faktor penyebab korupsi terjadi karena antara lain aspek perilaku individu, aspek organisasi dan masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Manusia terdorong untuk melakukan korupsi karena sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, tidak mau bekerja keras dan gaya hidup yang konsumtif.

Menurut Jack Bologne ada empat akar penyebab terjadinya korupsi yaitu: *Greed, Opportunity, Need, dan Exposes*. *Greed*, terkait dengan keserakahan dan kerakusan oleh para pelaku korupsi. Tipe seperti itu, adalah tipe orang yang tidak pernah puas dengan keadaan dirinya, sehingga mempunyai impian yang berlebihan. *Opportunity* terkait dengan sistem yang memberikan kesempatan atau celah terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang tidak rapi, dapat menyebabkan seorang bekerja asal-asalan. Bebas memanipulasi data, bebas berlaku curang, dan peluang

korupsi terbuka lebar. *Need*, berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposes* yang berkaitan dengan hukuman yang rendah terhadap pelaku korupsi, hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku korupsi.

C. Biaya korupsi

Biaya korupsi dapat diringkas menjadi tiga kategori yaitu:

1. Pemborosan sumber daya
2. Penyimpangan alokasi
3. Kegagalan yang membawa misalnya: korupsi membuat pemerintah kehilangan legitimasi

D. Dampak negatif korupsi

1. Dampak terhadap ekonomi

Apapun alasannya, perilaku korupsi lebih banyak menimbulkan dampak negative daripada positifnya. Korupsi berefek buruk terhadap perkembangan ekonomi, politik, social, budaya dan lain sebagainya.

Di sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor *privat*, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan. Walaupun begitu, ada juga yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah

birokrasi yaitu adanya sogokan menyebabkan pejabat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan dunia perdagangan. Perusahaan-perusahaan yang dekat dengan pejabat dilindungi dari persaingan, hasilnya perusahaan-perusahaan menjadi tidak efisien (Nawatmi, 2013)

Dampak negatif lainnya, korupsi telah menimbulkan distorsi pada sector publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Adanya korupsi juga menjadi sebab turunnya kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan meningkatkan tekanan pada anggaran pemerintah.

Dampak kualitatif korupsi terhadap perekonomian (Hoesodo, 2014) yaitu mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sector public. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai *deficit fiscal* yang besar, meningkatkan *income inequality*, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat adanya indikasi yang kuat, bahwa meningkatkan perubahan pada distribusi pendapatan terutama di Negara-negara yang sebelumnya memakai system ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama pada proses privatisasi perusahaan Negara lebih lanjut korupsi mendistorsi mekanisme pasar dan alokasi sumber daya dikarenakan:

1. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan control akibat kegagalan pasar (*market failure*). Ketika kebijakan dilakukan dalam pengaruh korupsi yang kuat maka penerapan peraturan dan kebijakan, misalnya, pada perbankan, pendidikan dan sebagainya, malah akan mendorong terjadinya inefisiensi.
2. Korupsi mendistorsi insentif seseorang, dan seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi dan pada akhirnya menyumbang negatif *value added*.
3. Korupsi menjadi bagian dari *welfare cost* memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun.
4. Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah (misalnya pada penerapan dan pembuatan kontak, proteksi, pemberian *property rights* dan sebagainya). Pada akhirnya hal ini akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
5. Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi. Kasus seperti ini sangat terlihat pada Negara yang sedang mengalami masa transisi, baik dari tipe perekonomian yang sentralistik ke perekonomian yang lebih terbuka atau pemerintah otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis, sebagaimana terjadi kasus Indonesia, dan

6. Korupsi memperbesar angka kemiskinan, ini sangat wajar. Selain dikarenakan program-program pemerintah sebagaimana disebutkan di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin.

2. Dampak terhadap Politik

Pada dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik dimana korupsi dapat menghancurkan proses formal yang sudah dibentuk. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembuatan kebijakan. Korupsi pada system pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi pada pemerintah publik menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan pada masyarakat. Jadi secara umum, korupsi telah mengikis kemampuan lembaga pemerintahan yang ada karena adanya pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan adanya pejabat yang di angkat bukan karna faktor prestasi. Korupsi sekaligus juga menurunkan legitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi.

Dampak negatif lainnya, korupsi telah menimbulkan distorsi pada sector public dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Untuk menyembunyikan praktek korupsi, bisa jadi pejabat menambah kompleksitas proyek masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan lebih banyak kekacauan. Adanya korupsi juga menjadi sebab

menurunnya kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur dan meningkatkan tekanan pada anggaran pemerintah.

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan (*demand*) ialah dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor, dan impor sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sector dalam produksi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indicator perkembangan PDB atau PNB dari tahun ke tahun. Adapun cara menghitung laju pertumbuhan dilakukan dengan tiga metode yaitu, cara tahunan, cara rata-rata setiap tahun, dan cara *compounding* faktor (Hasanah, 2016).

Menurut Zaris, (1987) pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestic regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat (Sukirno, 1994).

Menurut Boediono, (1992) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang, Pertumbuhan disini meliputi tiga aspek yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output per kapita, dalam hal ini ada 2 aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah *output* total dibagi jumlah penduduk.
2. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) suatu perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu.
3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu jangka panjang. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang cukup lama (5tahun) mengalami kenaikan output.

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menilai keberhasilan atas pertumbuhan yang telah dilakukan di daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana tinggi rendahnya nilai PDRB daerah tersebut. Meskipun pertumbuhan ekonomi belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum (Hasanah, 2016).

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Menurut Adam Smith

Adam Smith mengatakan ada beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangannya yang pertama yaitu peranan system pasar bebas, Smith berpendapat bahwa system mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Kedua, perluasan pasar, perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjual kepada masyarakat dan mencari untung. Ketiga, spesialisasi dan kemajuan teknologi, perluasan pasar dan perluasan ekonomi yang digalakkannya, akan memungkinkan dilakukan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya spesialisasi dan perluasan kegiatan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan pekerja dan kenaikan ini akan memperluas pasaran.

Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sector-sector dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan bergantung pada faktor-faktor produksi (Sukirno, 1994)

2. Teori Harrod Domar

Dalam menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi, teori Harrod Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady state* dalam jangka panjang. Analisis Harrod dan Domar menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh (*full employment*)
2. Tabungan adalah proporsional terhadap pendapatan.
3. Rasio antara modal dan produksi (*capital output ratio*)
4. Perekonomian adalah terdiri dari dua sektor.

Analisis yang dilakukan Harrod dan Domar adalah pelengkap dari analisis yang dilakukan oleh Keynesian. Dalam analisis yang dilakukan Keynesian adalah persoalan ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam analisis Harrod-Domar merupakan ekonomi jangka panjang.

3. Menurut Malthus dan Ricardo

Tidak semua ahli ekonomi klasik yang mempunyai pendapat yang positif mengenai prospek jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Malthus dan Ricardo mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsisten. Jumlah penduduk atau tenaga kerja ialah berlebihan apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain, peningkatan jumlah penduduk akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat.. maka,

peningkatan penduduk yang terus berlaku tanpa diikuti penambahan sumber-sumber daya yang lain akan menyebabkan kemakmuran masyarakat mundur kembali ke tingkat subsisten.

4. Teori Schumpeter

Pada awal abad ini berkembang pula suatu pemikiran baru mengenai sumber dari pertumbuhan ekonomi dan sebabnya konjungtur berlaku. Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan menjadi secara terus menerus akan tetapi mengalami keadaan dimana adakalanya berkembang dan mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan pengusaha (*entrepreneur*) melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi.

5. Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Dalam ekonomi neo-klasik, permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan. Dengan demikian menurut teori Neo-Klasik, sampai dimana perekonomian akan berkembang, tergantung kepada penambahan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi (Jhingan, 2004).

Sebagai perluasan dari teori Keynes, Teori Harrod dan Domar melihat persoalan pertumbuhan dari segi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya berlaku apabila pengeluaran agregat melalui kenaikan investasi bertambah terus menerus

pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan. Teori pertumbuhan neoklasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Abramovist Solow pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi (Hasanah, 2016).

Menurut teori pertumbuhan Neo-Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi.

Sumbangan terpenting dari pertumbuhan Neo Klasik bukanlah menunjukkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut.

6. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen lahir sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan NeoKlasik mengenai *diminishing marginal productivity of capital* dan konvergenitas pendapatan diberbagai Negara. (Romer dalam Nawatmi, 2014) mengembangkan model pertumbuhan endogen sebagai akibat dari adanya *knowledge externality*. Suatu perusahaan dapat lebih produktif dari perusahaan lain karena perusahaan tersebut mempunyai rata-rata *stock knowledge* yang lebih tinggi dari pada perusahaan lainnya. Berdasarkan model tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat output perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh faktor *knolegde capital*. Faktor produksi ini dalam

implementasinya dapat berkembang menjadi faktor produksi perusahaan lain melalui mekanisme *learning by doing* atau *spillovers*.

Teori pertumbuhan endogen yang di pelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) merupakan awal kebangkitan dari pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi modern yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijelaskan secara baik oleh teori NeoKlasik, seperti penjelasan mengenai *decreasing return to capital*, persiangan sempurna dan eksogenitas teknologi dalam model pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen merupakan suatu teori pertumbuhan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan dalam jangka panjang ditentukan dari dalam model dari pada oleh beberapa variable pertumbuhan yang dianggap eksogen.

Model pertumbuhan endogen menolak asumsi penyusutan imbalan marginal atas investasi modal (*dimishing marginal return to capital investment*). Di dalam model endogen justru hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat disuatu Negara semakin besar. Dengan asumsi jika investasi dibidang sumber daya manusia atau *human capital* dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu peningkatan produktivitas sehingga mampu mengimbangi kecenderungan alami jika penurunan skali hasil, model pertumbuhan endogen

mencoba menjelaskan terjadinya divergensi pola pertumbuhan ekonomi antar Negara dalam jangka panjang (Todaro, 2000).

Todaro juga menyatakan bahwa persamaan sederhana dari model pertumbuhan endogen ialah:

$$Y = AK$$

Y adalah output, A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal, dan K melambangkan modal fisik. Persamaan tersebut menjelaskan adanya kemungkinan bahwa investasi modal fisik dan modal manusia akan menciptakan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang melampaui keuntungan pihak swasta yang melakukan investasi tersebut dan kelebihanannya cukup untuk mengimbangi penurunan skala hasil. Hal tersebut akan menciptakan peluang-peluang investasi baru sehingga hasil akhirnya adalah peningkatan skala hasil yang mampu menciptakan proses pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat didefinisikan dalam konsep dunia modern adalah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makanan, serta kebutuhan pendidikannya dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status

social yang mengantarkan pada status social yang sama terhadap sesama warga/masyarakat lainnya.

Adapun pengertian kesejahteraan menurut Undang-Undang tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan social materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan keutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Kesejahteraan juga bisa diartikan sebagai satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas social dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan social dalam masyarakat. Mekan setiap orang/ individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal material maupun dalam hal non material sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat. Kesejahteraan juga merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa sudah berada pada kondisi sejahtera (widyastuti, 2012).

Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Melihat pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena

dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan (Dwi dalam Widyastuti, 2012).

Mengukur kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari Index Pembangunan Manusia (*HDI = Human Development Indeks*). Indeks pembangunan manusia adalah suatu indikator komposit yang terdiri dari tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi keluarga. Indikator yang dipakai dibidang kesehatan adalah angka harapan hidup, dibidang pendidikan adalah angka membaca pada orang dewasa yang dikombinasikan dengan angka masuk SD< SMP< dan SMA, serta untuk kemampuan ekonomi dipakai (PDB) Produk Domestik Bruto (Murti, 2003).

Kesejahteraan juga selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya juga dapat diukur dari non materi melalui tingkat pendidikan, kesehatan, dan kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik (Mandala dalam Widyastuti 2012).

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas hidup penduduk dan kesejahteraan masyarakatnya. Kualitas hidup tercermin dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang dilihat dari tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya maka akan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta

memperoleh pendapatan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses kesehatan (Erwin dkk, 2014).

Pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat, seperti pilihan untuk pendidikan, pilihan untuk sehat dan kehidupan yang layak. Pembangunan manusia merupakan konsep yang sempurna dengan deskripsi pembangunan yang berkelanjutan (UNDP dalam Erwin dkk, 2014). Ada 12 kategori dalam pembangunan manusia yaitu : kondisi indeks pembangunan manusia itu sendiri, ketimpangan, kebebasan berpolitik, pemberdayaan, kesejahteraan mental, hubungan social, kesejahteraan masyarakat, kondisi kerja, kondisi rekreasi, politik dan keamanan, kondisi lingkungan dan kemananan ekonomi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Seri Jefri Adil Waruwu	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, belanja Pemerintah, dan Investasi terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014.	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda.	hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia	Judul penelitian, variable penelitian, tahun penelitian.

				<p>tahun 1995-2014, pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, belanja pemerintah berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dan investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1994-2014.</p>	
2.	Desi Yulianti	<p>Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, pengangguran dan Upah terhadap Kemiskinan di DIY tahun 2007-2013.</p>	<p>Peneliti menggunakan periode waktu 2007-2013 menggunakan analisis regresi data panel dimana model yang tepat perlu adanya uji signifikan yang terdiri dari uji Hausman dan uji Chow. uji</p>	<p>Hasil penelitiannya adalah indeks pembangunan manusia dan upah berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan penganggura</p>	<p>Tempat penelitian, tahun penelitian, dan variable penelitian</p>

			<p>Hausman untuk mengetahui apakah peneliti menggunakan model common effect atau model fixed effect begitu pula uji Chow untuk mengetahui apakah model yang tepat digunakan menggunakan fixed effect atau random effect.</p>	<p>n berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di DIY tahun 2007-2013.</p>	
3.	<p>Rahma Amalia, Madris, Abd.Rahman Razak</p>	<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan</p>	<p>Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode SEM (<i>Structural Equation Modeling</i>). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung dibidang pendidikan,</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah secara langsung positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengaruh</p>	<p>Judul penelitian, Tahun Penelitian, Variabel penelitian, Metode Analisis</p>

			kesehatan dan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan.	pengeluaran pusat terhadap kemiskinan secara langsung berpengaruh negative dan tidak signifikan. Sedangkan secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat	
4.	Fransiska Hastin Wulandari	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012.	Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooled data) yaitu sebuah data yang berisi data sampel individu yang menggabungkan antara data cross section dan time series dan menggunakan olah data panel.	Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kemiskinan di provinsi. Inflasi yang terjadi mempengaruhi kemiskinan dimana inflasi meningkat maka kemiskinan	Tahun penelitian, variable penelitian

				akan turut meningkat. Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan yang apabila pengangguran turun maka kemiskinan akan ikut turun. Faktor pendidikan tidak dapat mempengaruhi kemiskinan karena ketidaksiapan lulusan SMA untuk bersaing dalam dunia kerja.	
5.	Gadis Mahkota Negara	Analisis Hubungan Korupsi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Indonesia	Model penelitian yang digunakan adalah dengan model langsung dan tidak langsung. Terdapat dua model pada Indirect Method, model belanja berdasarkan pada konseptual	Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kemiskinan tidak signifikan dipengaruhi oleh korupsi secara statistic baik melalui model tidak langsung dengan perantara	Judul penelitian, variable penelitian, tahun penelitian

			<p>belanja dipengaruhi oleh kapasitas keuangan daerah dan korupsi. Sedangkan model kedua adalah model kemiskinan, secara tidak langsung dipengaruhi oleh kapasitas keuangan daerah (DBH) dan alokasi moneter untuk menangani kemiskinan yang terdapat pada total belanja</p>	<p>total belanja daerah, dan model langsung pada kabupaten/kota di Indonesia. Korupsi dalam bentuk persepsi belum mempengaruhi kemiskinan secara makro di Indonesia. Artinya korupsi bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia.</p>	
--	--	--	--	---	--

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Waruwu (2016) yang berjudul “ Analisis pengaruh Perumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014” penelitian yang menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, belanja pemerintah, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Dengan hasil penelitian

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran positif terhadap tingkat kemiskinan, dan investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2016) yang berjudul “ Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Terhadap Kemiskinan di DIY Tahun 2007-2013” penelitian yang menggunakan teknik total sampling yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Dengan hasil menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan upah berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di DIY tahun 2007-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia, dkk (2015) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat”. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode SEM (*Structural Equation Modeling*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan. Hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah secara langsung positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengaruh pengeluaran pusat terhadap

kemiskinan secara langsung berpengaruh negative dan tidak signifikan. Sedangkan secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat

Penelitian yang dilakukan Wulandari (2015) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012”. Penelitian yang menggunakan data sekunder dengan metode analisis menggunakan data pooling. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kemiskinan di provinsi. Inflasi yang terjadi mempengaruhi kemiskinan dimana inflasi meningkat maka kemiskinan akan turut meningkat. Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan yang apabila pengangguran turun maka kemiskinan akan ikut turun. Faktor pendidikan tidak dapat mempengaruhi kemiskinan karena ketidaksiapan lulusan SMA untuk bersaing dalam dunia kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Gadis (2013) yang berjudul “Analisis Hubungan Korupsi dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Indonesia”. Permasalahan kemiskinan menjadi kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, sejak berlakunya otonomi daerah untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri. Kondisi ini dimanfaatkan sebagian orang untuk melakukan tindakan korupsi. Penelitian ini menganalisis hubungan korupsi dan kemiskinan pada 60 kabupaten/kota di Indonesia periode 2006,2008, dan 2010 menggunakan model langsung dan tidak langsung. Model tidak langsung menggunakan model pemerintah sebagai perantara antara

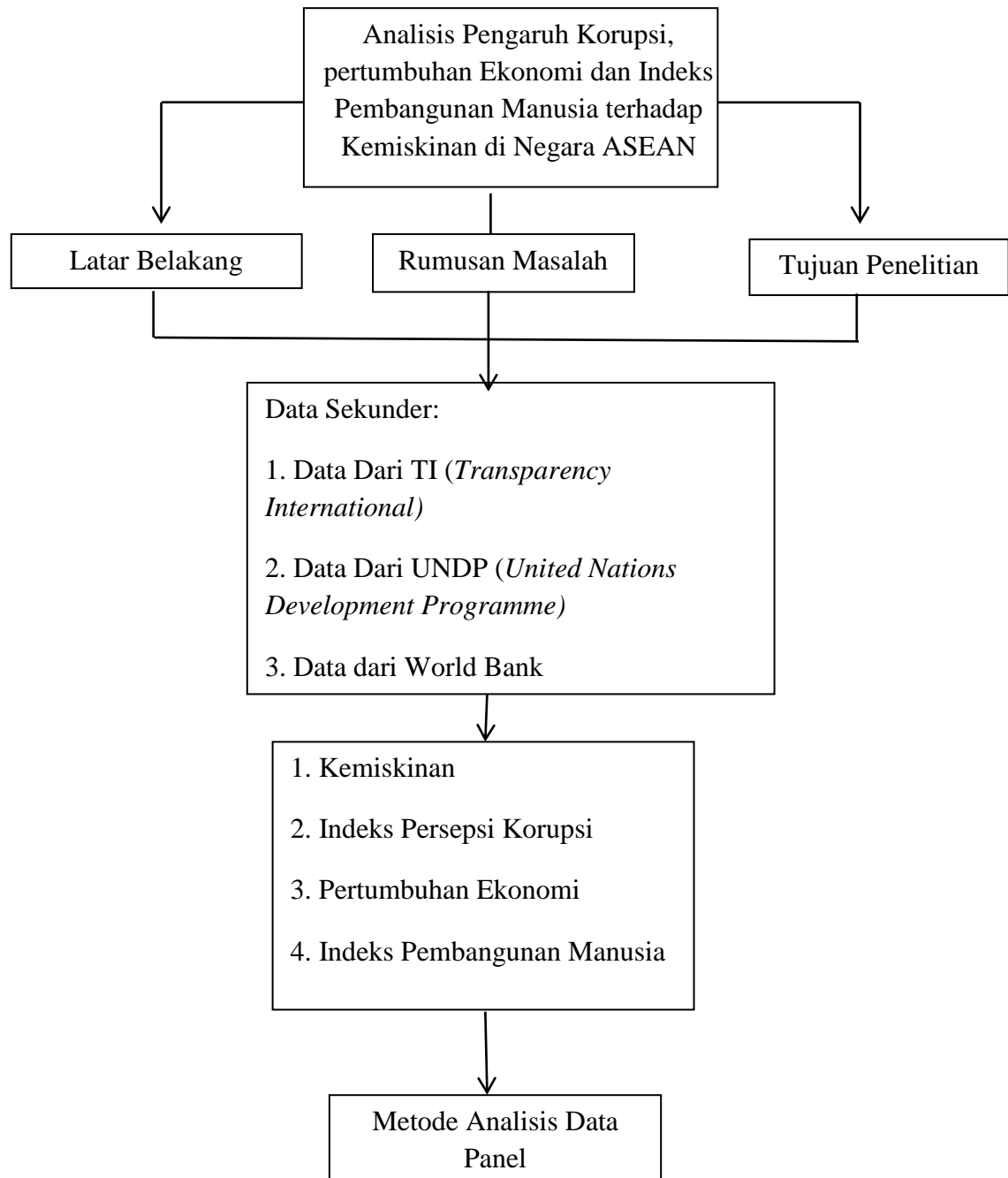
korupsi dan kemiskinan dengan metode estimasi *three stage least square* (3SLS). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik model langsung dan tidak langsung korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia.

C. Hipotesis

1. Korupsi diduga berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
2. Pertumbuhan Ekonomi diduga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
3. Pembangunan Manusia diduga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

D. Model Penelitian

Untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan serta memperjelas akar pemikiran penelitian, berikut adalah gambar model penelitian:



Gambar 2.1
Model penelitian